



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2023 KECAMATAN KEDUNGKANDANG



PEMERINTAH KOTA MALANG  
KECAMATAN KEDUNGKANDANG

Jl. Mayjen Sungkono No.59 Malang Telp. (0341) 752273

<http://kec-kedungkandang.malangkota.go.id>, e-mail: [kec-kedungkandang@malangkota.go.id](mailto:kec-kedungkandang@malangkota.go.id)

Kode Pos: 65137

## KATA PENGANTAR

**Laporan Kinerja Kecamatan Kedungkandang merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun 2023. Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Kedungkandang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Kecamatan Kedungkandang Tahun 2018 – 2023.**



Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Kedungkandang dan wujud transparansi pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja Kecamatan Kedungkandang. Kinerja Kecamatan Kedungkandang diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Kedungkandang Tahun 2023.

Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan program/kegiatan dan anggaran, serta perumusan kebijakan unsur kewilayahan di tahun mendatang. Ungkapan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras melakukan segala daya dan upaya hingga tercapainya target kinerja dan terselesaikannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kedungkandang Tahun 2023.



**Camat Kedungkandang,**

**DR. FAHMI FAUZAN AZ, M. Si**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>2</b>
A. Tugas Dan Fungsi.....	3
B. Susunan Organisasi.....	14
C. Sumber Daya Manusia.....	16
D. Peras Strategis.....	16
<b>BAB II.....</b>	<b>19</b>
<b>PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>20</b>
A. Perencanaan Kinerja.....	20
B. Indikator Kinerja Utama.....	23
C. Perjanjian Kinerja.....	24
D. Standar Penilaian Kinerja.....	25
<b>BAB III.....</b>	<b>26</b>
<b>AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>27</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	27
1. Target dan realisasi kinerja Tahun 2023.....	28
2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023.....	29
3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis.....	30
4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja) .....	31
5. Analisa Penyebab keberhasilan/ Kegagalan.....	32
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	34
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	35
B. Realisasi Anggaran.....	51
<b>BAB IV.....</b>	<b>61</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>63</b>
1) Matrik Renstra	
2) Perjanjian Kinerja	
3) Ringkasan Pengukuran Kinerja/ Rekap data pengukuran yang sesuai IKU	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pegawai Berdasarkan Golongan.....	16
Tabel 2.1 Matrik Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2018-2023.....	20
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	21
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	23
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.....	24
Tabel 2.5 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.....	25
Tabel 2.6 Standar Pencapaian.....	25
Tabel. 3.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023.....	28
Tabel. 3.2 Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023.....	29
Tabel 3.3. Realisasi Kinerja Yang Mengacu Pada Target Jangka Menengah Rensta.....	30
Tabel 3.4. Realisasi kinerja dan Standart Pelayanan Minimal/Standar Nasional lainnya.....	31
Tabel 3.5. Realisasi kinerja dan Standart Pelayanan Minimal/ Standar Nasional lainnya.....	32
Tabel 3.6 Keberhasilan/Kegagalan Capaian Indikator Kinerja Utama....	32
Tabel 3.7. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Anggaran....	34
Tabel 3.8. Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	36
Tabel 3.9. Analisa Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Program Kegiatan.....	37
Tabel 3.10. Realisasi Anggaran per Subkegiatan Tahun 2023.....	52

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Kedungkandang.....	15
Gambar 2 Capaian Realisasi Nilai Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas).....	30
Gambar 3 Capaian Gambar 4. Capaian Realisasi Nilai SAKIP Perangkat Daerah..	31
Gambar 4 Realisasi Nilai Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik (IKLI).....	31

# BAB I PENDAHULUAN



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Kecamatan Kedungkandang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana teknis kewilayahan pada Pemerintah Kota Malang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang No. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Malang No. 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

Sebagai unsur pelaksana teknis kewilayahan, wilayah kerja Kantor Kecamatan Kedungkandang meliputi seluruh wilayah Kecamatan Kedungkandang, terdiri dari 12 Kelurahan yaitu, Kelurahan Arjowinangun, Kelurahan Bumiayu, Kelurahan Buring, Kelurahan Cemorokandang, Kelurahan Kedungkandang, Kelurahan Kotalama, Kelurahan Lesanpuro, Kelurahan Madyopuro, Kelurahan Mergosono, Kelurahan Sawojajar, Kelurahan Tlogowaru, Kelurahan Wonokoyo.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai, juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka Laporan ini berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Oleh karena itu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kedungkandang yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Camat kepada Walikota yang telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 2 ayat (2) Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa, dan pasal 4 ayat (2) Daerah kabupaten/kota selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah kabupaten/kota.

## **A. Tugas Dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Dalam merealisasikan program kebijakan pemerintah, Kecamatan Kedungkandang mempunyai 1 orang Camat, 1 orang Sekretaris Camat, 2 orang Kasubbag, 3 orang Kepala Seksi, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 41).

### **KEDUDUKAN**

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan, berkedudukan di bawah Walikota.
- (2) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan, dan berkedudukan di bawah Camat.
- (3) Seksi pada Kecamatan dipimpin oleh Kepala Seksi, dan berkedudukan di bawah Camat.
- (4) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian, dan berkedudukan di bawah Sekretariat.
- (5) Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang berkedudukan dibawah Camat.
- (6) Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh Sekretaris Kelurahan, dan berkedudukan di bawah Lurah.
- (7) Seksi pada Kelurahan dipimpin oleh Kepala Seksi, dan berkedudukan di bawah Lurah.

### **TUGAS DAN FUNGSI**

#### **CAMAT**

- (1) Camat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan
- c. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- d. pengoordinasian upaya penyeleggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- f. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- i. penyelenggaraan layanan umum di tingkat Kecamatan;
- j. pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kerjanya;
- k. pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- l. pelaksanaan administrasi Kecamatan;
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Kecamatan;  
dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai bidang tugasnya.

## SEKRETARIAT

- (1) Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan program Sekretariat berdasarkan perencanaan strategis;
  - b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan;
  - d. pengkoordinasian pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
  - e. pelaksanaan program Sekretaris;

- f. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi serta kerja sama;
- g. pelaksanaan ketatalaksanaan dan hubungan masyarakat serta bahan publikasi;
- h. pelaksanaan survei kepuasan masyarakat;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya.

#### SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan perencanaan, monitoring, evaluasi, penyiapan bahan administrasi keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan dan keuangan Kecamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Subbagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan program Sekretariat
  - b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran;
  - c. pelaksanaan pengumpulan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran, perjanjian kinerja, pelaporan capaian kinerja;
  - d. pelaksanaan penatausahaan keuangan;
  - e. penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan akuntansi keuangan;
  - f. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
  - g. penyiapan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
  - h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

## SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan administrasi umum meliputi ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kerja sama, hubungan masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan serta pengelolaan administrasi kepegawaian Kecamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan program Sekretariat;
  - b. penyiapan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
  - c. penyiapan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
  - d. penyiapan bahan pelaksanaan tugas di bidang hubungan masyarakat;
  - e. penyiapan bahan penyusunan perencanaan kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, sasaran kinerja pegawai, daftar urutan kepangkatan, sumpah/janji aparatur sipil negara, gaji berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
  - f. penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan, serta pengamanan perlengkapan dan aset;
  - g. penyiapan bahan pelaksanaan pengadministrasian aset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;
  - h. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghapusan serta penatausahaan barang milik daerah;
  - i. penyiapan bahan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
  - j. penyusunan standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
  - k. pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat;

- l. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

#### SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN

- (1) Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban di tingkat Kecamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemerintahan Ketenteraman dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban;
  - b. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum tingkat Kecamatan;
  - c. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan administrasi Kelurahan;
  - d. penyiapan bahan dan pelaksanaan administrasi kependudukan;
  - e. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
  - f. penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan Kelurahan;
  - g. penyiapan bahan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
  - h. penyiapan bahan dan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan;
  - i. penyiapan bahan dan koordinasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana;
  - j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya.

## SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- (1) Seksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis, pemantauan dan pelaksanaan koordinasi kebijakan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  - b. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan;
  - c. penyiapan bahan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan;
  - d. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kelurahan;
  - e. penyiapan bahan koordinasi pemberdayaan masyarakat bidang pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, lingkungan hidup, pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga;
  - f. penyiapan bahan koordinasi penanganan masalah kemiskinan dan kesejahteraan rakyat;
  - g. penyiapan bahan dan pembinaan lembaga kemasyarakatan di tingkat Kelurahan;
  - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya.

## SEKSI PRASARANA DAN SARANA

- (1) Seksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis, pemantauan dan pelaksanaan koordinasi kebijakan prasarana dan sarana di tingkat Kecamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Prasarana dan Sarana menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Prasarana dan Sarana;
  - b. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pemeliharaan prasarana dan sarana di tingkat Kecamatan;

- c. penyusunan perencanaan teknis pemeliharaan prasarana dan sarana fasilitas pelayanan umum;
- d. penyiapan bahan pembinaan teknis dan administratif pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- g. pengumpulan, pengolahan, penyajian data prasarana dan sarana layanan umum tingkat Kecamatan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Prasarana dan Sarana; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya.

#### KELURAHAN

- (1) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kelurahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelurahan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Kelurahan;
  - b. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan Kelurahan;
  - c. pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
  - d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
  - e. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
  - f. pelaksanaan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - g. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di tingkat Kelurahan;
  - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Kelurahan; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya.

## SEKRETARIAT KELURAHAN

- (1) Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan di tingkat Kelurahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Kelurahan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan program Kelurahan berdasarkan perencanaan strategis;
  - b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan;
  - d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi serta kerja sama;
  - e. pelaksanaan ketatalaksanaan dan hubungan masyarakat serta bahan publikasi;
  - f. pengelolaan barang milik daerah yang menjadi kewenangan Kelurahan;
  - g. pelaksanaan survei kepuasan masyarakat;
  - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Lurah sesuai bidang tugasnya

## SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN

- (1) Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban di tingkat Kelurahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemerintahan Ketenteraman dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban;
  - b. penyiapan bahan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum tingkat Kelurahan;
  - c. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi Kelurahan;

- d. penyiapan bahan pelaksanaan administrasi kependudukan;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan Kelurahan;
- g. penyiapan bahan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat Kelurahan;
- h. penyiapan bahan penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Lurah sesuai bidang tugasnya.

#### SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis, pemantauan dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kelurahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  - b. penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kelurahan;
  - c. penyiapan bahan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kelurahan;
  - d. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kelurahan;
  - e. penyiapan bahan pemberdayaan masyarakat bidang pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, lingkungan hidup, pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga;
  - f. penyiapan bahan penanganan masalah kemiskinan dan kesejahteraan rakyat;
  - g. penyiapan bahan dan pembinaan lembaga kemasyarakatan di tingkat Kelurahan;

- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Lurah sesuai bidang tugasnya.

#### SEKSI PRASARANA DAN SARANA

- (1) Seksi Prasarana dan Sarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis, pemantauan dan pelaksanaan kebijakan prasarana dan sarana di tingkat Kelurahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Prasarana dan Sarana menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Prasarana dan Sarana;
  - b. penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan pemeliharaan prasarana dan sarana di tingkat Kelurahan;
  - c. penyusunan perencanaan teknis pemeliharaan prasarana dan sarana fasilitas pelayanan umum;
  - d. penyiapan bahan pembinaan teknis dan administratif pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - e. penyiapan bahan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - f. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - g. pengumpulan, pengolahan, penyajian data prasarana dan sarana pelayanan umum tingkat Kelurahan;
  - h. penyiapan bahan fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat pelaksana swakelola pekerjaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Prasarana dan Sarana; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Lurah sesuai bidang tugasnya

## KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Di lingkungan Kecamatan dapat di bentuk jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.

- 1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- 2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- 3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana di maksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang undangan.

## TATA KERJA

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Camat, Sekretaris camat, Kepala Seksi pada Kecamatan, Lurah, Sekretaris Kelurahan serta Kepala Seksi pada Kelurahan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasibaik di lingkungan internal maupun antar perangkat daerah dalam Pemerintah Daerah, antar instansi vertikal Kementrian serta unsur pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota
- (2) Pejabat fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Camat, Sekretaris camat, Kepala Seksi pada Kecamatan, Lurah, Sekretaris Kelurahan, serta Kepala Seksi pada Kelurahan yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
- (3) Kedudukan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan. Setiap unsr pimpinan pada Kecamatan wajib melaksanakan tugas dan fungsi, pengawasan melekat dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada masing masing pimpinan secara berjenjang.
- (4) Camat dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Sekretaris Kecamatan, dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Camat.

- (6) Kepala Subbagian pada Kecamatan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.
- (7) Lurah dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Camat.
- (8) Sekretaris Kelurahan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Lurah.
- (9) Kepala Seksi pada Kelurahan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Lurah

## **B. Susunan Organisasi**

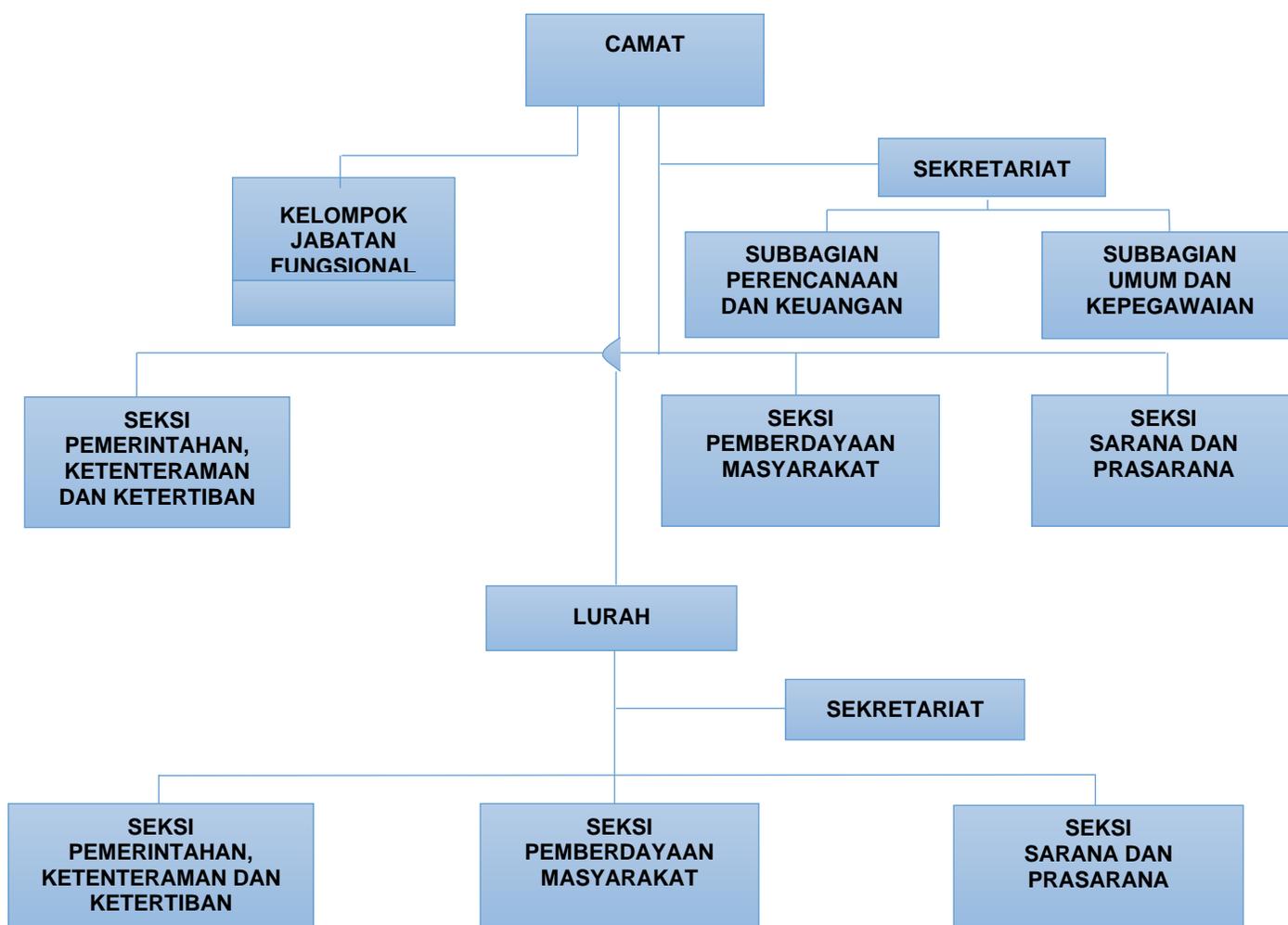
Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari:

1. Camat;
2. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari:
  - a) Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
  - b) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
3. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
5. Seksi Prasarana dan Sarana Umum;

Kelurahan, terdiri dari:

1. Lurah;
2. Sekretariat Kelurahan;
3. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
5. Seksi Prasarana dan Sarana Umum; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional

**Gambar 1. Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Kedungkandang**



### C. Sumber Daya Manusia

Dalam menunjang tugas dan fungsinya, Kecamatan Kedungkandang Tahun 2023 memiliki 130 PNS dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1.1. Data Pegawai Berdasarkan Golongan**

No	Pangkat	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a	I/d	I/c	I/b	Jumlah
1	Kec. Kedungkandang	1	1	1	2	0	5	2	3	0	0	0	0	0	15
2	Kedungkandang	0	1	2	1	1	1	2	3	0	0	0	0	0	11
3	Kotalama	0	1	2	1	1	0	0	2		0	0	0	0	7
4	Mergosono	0	0	4	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	10
5	Bumiayu	0	0	2	2	1	0	0	2	1	0	0	0	0	8
6	Wonokoyo	0	0	2	2	0	0	1	3	2	0	0	0	0	10
7	Buring	0	0	3	2	1	1	0	3	0	0	0	0	0	10
8	Lesanpuro	0	1	2	2	2	0	1	1	1	0	0	0	0	10
9	Sawojajar	0	0	4	1	3	0	1	0	1	0	0	0	0	10
10	Madyopuro	0	1	2	2	0	0	3	1	1	1	0	0	0	11
11	Cemorokandang	0	0	2	3	2	1	0	0	0	1	0	0	0	9
12	Arjowinangun	0	0	4	0	1	0	2	1	1	0	0	1	0	10
13	Tlogowaru	0	3	0	0	2	0	1	1	0	2	0	0	0	9
	<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>30</b>	<b>19</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>21</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>130</b>

### D. Peran Strategis

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Kedungkandang bertitik tolak dari pengertian isu – isu strategis diatas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kedungkandang, maka permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Kedungkandang yang berhasil diobservasi dan dihimpun adalah sebagai berikut:

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tugas Pokok dan Fungsi:

- 1) Inovasi-inovasi dibidang kependudukan dengan melibatkan masyarakat/fasilitas untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi, dan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan, serta tuntutan masyarakat.
- 2) Penelitian-penelitian dibidang lintas sektor yang memberikan dampak besar bagi pembangunan Kecamatan Kedungkandang dan strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan, koordinasi dan dinamika perubahan.
- 3) Koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi.

- 4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan kependudukan dan sosialisasi Peraturan Daerah untuk meminimalkan deviasi terhadap Visi dan Misi.
- 5) Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan proses dengan melibatkan masyarakat/fasilitas untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi pembangunan Kecamatan Kedungkandang Kota Malang secara lebih terstruktur. Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk meningkatkan hasil penelitian lintas sektor untuk meningkatkan kualitas perencanaan, koordinasi dan monitoring dan evaluasi.

#### Sumber Daya Manusia Aparatur

- 1) Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk mengikatkan proses dan hasil kegiatan.
- 2) Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.

#### Sarana dan Prasarana

- 1) Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntunan tugas.
- 2) Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.

Berikut isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi, partisipasi masyarakat serta pelayanan di Kecamatan Kedungkandang secara singkat:

1. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kedungkandang
  - a. Struktur Organisasi dan tata kerja di Kecamatan Kedungkandang  
Kecamatan berdasar pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, kelembagaan non pemerintah, wilayah, dan masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi kota Malang.
  - b. Dibutuhkan mekanisme teknis mengenai hubungan kerja dan koordinasi dengan OPD lain. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas.

2. Berdasarkan partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah.
  - a. Partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam pembangunan Pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah harus didorong sehingga menumbuhkan ekonomi masyarakat. Kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
  - b. Meningkatkan partisipasi pemuda, dan kalangan usia produktif Pemuda, kalangan usia produktif didorong dalam usaha mandiri untuk meningkatkan produktifitas hasil kerajinan dalam rangka menciptakan lapangan kerja dan usaha.
3. Berdasarkan prosedur operasional pelayanan PATEN

Pelayanan PATEN yaitu Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sebagai slogan pelayanan publik di Kecamatan Kedungkandang. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kota Malang yang menyelenggarakan pelayanan publik, harus benar-benar mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Diperlukan Standar pelayanan yang secara normatif dan dikomunikasikan kepada masyarakat. PATEN diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat.

# BAB II PERENCANAAN KINERJA



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Perencanaan Kinerja

##### 1. Tujuan dan Sasaran

Penyusunan Perencanaan kinerja Kecamatan Kedungkandang tahun 2023 mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA), APBD Tahun 2023, Strategi dan Prioritas APBD Tahun 2023 untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan : Terwujudnya Kecamatan Yang Profesional dan Akuntabel

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah

Sasaran Kecamatan Kedungkandang:

1. Sasaran : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas

Indikator : Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kecamatan

2. Sasaran : Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara Terpadu

Indikator : Indeks Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik (IKLI)

3. Sasaran : Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah

Indikator : Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Kecamatan Kedungkandang Tahun Anggaran 2023 seperti tercantum pada tabel 2.1. sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Matrik Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2018-2023**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Terwujudnya Kecamatan Yang Profesional dan Akuntabel</b>		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	75.00	76.00	80.00	80.00	80.03	80.04
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Komunitas	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kecamatan	0	70.00	72.5	75.00	77.5	80.00
	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara Terpadu	Indeks Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik (IKLI)	3.5	3.00	3.25	33.5	3.50	3.65
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74.86	80.00	80.01	80.02	80.03	80.03

**Tabel 2.2. Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD**

Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke				
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah</b>	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	IKM Pelayanan Perangkat Daerah	75.00	76.00	80.00	80.00	80.03	80,04
<b>Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas</b>	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kecamatan	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan				94%	94%	94%
			Rasio Linmas per RT		1	1	1	1	1
			Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan melalui Forkopimcam				92%	96%	100%
<b>Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas</b>	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kecamatan	Meningkatnya kapasitas penentuan prioritas dalam penanganan masalah di wilayah	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100%	41%	41.8%	84%	90%	96%
			Persentase Usulan Masyarakat Untk Sarana Prasarana di Wilayah Yang Diakomodir		3.74%	3.89%	33%	38%	43%
<b>Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara Terpadu</b>	Indeks Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik (IKLI)	Meningkatnya konsistensi perencanaan sarana dan prasarana kewilayahan dengan pelaksanaannya	Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan	85%	30%	35%	28%	30%	34%

## 1. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal.

### a. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk merelisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal.

Adapun strategi Kecamatan Kedungkandang adalah sebagai berikut:

1. Mensinergikan program pelayanan dengan OPD yang menjadi tanggung jawab Kecamatan dan Kelurahan;
2. Keselarasan data kependudukan;
3. Keselarasan data penerima bantuan pemerintah;
4. Menyelaraskan Road Map Kota Malang sebagai Kota Produktif dan Berdaya Saing berbasis Ekonomi Kreatif dengan program di Kecamatan Kedungkandang;
5. Meningkatkan peran serta lembaga sosial dan komunitas;
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pemerintah;
7. Mensinergikan program pembangunan infrastruktur OPD dengan program di Kecamatan dan Kelurahan;
8. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengusulan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.

b. Adapun arah kebijakan Kecamatan Kedungkandang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi antar instansi, baik instansi vertical maupun horizontal terkait sarana dan prasarana di Kecamatan Kedungkandang;
2. Penerapan sistem manajemen pelayanan yang mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan, yang lebih cepat, nyaman, aman, jelas serta terjaga profesionalisme petugas pelayanan;
3. Menciptakan budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas;
4. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait masalah kependudukan dan pencatatan sipil serta mensinergikan basis data kependudukan;
5. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial untuk mengoptimalkan layanan dasar kesehatan dan kemiskinan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
6. Meningkatkan koordinasi dengan OPD yang membidangi Ekonomi kreatif;
7. Meningkatkan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam bidang ekonomi kreatif, lingkungan, kemasyarakatan, dan keagamaan;

8. Mengintegrasikan basis data UMKM antara OPD yang membidangi dengan Kecamatan Kedungkandang;
9. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan ketrampilan serta melakukan pendampingan sehingga terwujud pembinaan yang berkelanjutan.
10. Meningkatkan peran serta lembaga sosial masyarakat;
11. Meningkatkan peran serta Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
12. Meningkatkan peran serta RT dan Linmas;
13. Meningkatkan indeks rasa aman, gotong royong dan toleransi;
14. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana lingkungan;
15. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam peningkatan kualitas sarana dan prasarana lingkungan;
16. Menciptakan stabilitas keamanan wilayah Kecamatan Kedungkandang.

## B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang ditetapkan dalam SK Keputusan Walikota Malang Nomor: 188.45/453/35.73.112/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Malang Nomor: 188.45/234/35.73.402/2019 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun 2019-2023.

Adapun IKU Kecamatan Kedungkandang Sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)**

No	Tujuan/Sasaran Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Kondisi awal	Target tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Terwujud nya Kecamatan Yang Profesional dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	75.00	76.00	80.00	80.00	80.03	80,04
<b>1</b>	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kecamatan	0	70.00	72.5	75.00	77.5	80.00
<b>2</b>	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara Terpadu	Indeks Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik (IKLI)	3.5	3.00	3.25	33.5	3.50	3.65
<b>3</b>	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74.86	80.00	80.01	80.02	80.03	80.03

### C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam perjanjian kinerja memuat sasaran strategis dengan merinci indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam tahun 2023 serta menyebutkan tentang program dan uraian kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis.

Dalam Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja utama dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Tahun 2023 secara rinci adalah sebagai berikut :

Tujuan : Terwujudnya Kecamatan Yang Profesional dan Akuntabel

Dengan sasaran, indikator dan target sebagai berikut :

**Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kecamatan Kedungkandang Kota Malang**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)
<b>Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpas Kota secara Terpadu</b>	Indeks Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik	3.65	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	9.496.160.860
<b>Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas</b>	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kecamatan	80.00	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	17.830.260.900
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.957.925.000
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	14.599.600
<b>Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah</b>	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85.2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	22.823.033.176
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	5.047.704.413

Tujuan : Terwujudnya Kecamatan Yang Profesional dan Akuntabel

Dengan sasaran, indikator dan target sebagai berikut :

**Tabel 2.5. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kecamatan Kedungkandang Kota Malang**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)
<b>Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpas Kota secara Terpadu</b>	Indeks Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik	3.65	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	9.413.319.935
<b>Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas</b>	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kecamatan	80.00	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	17.756.635.957
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.656.573.000
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	14.599.600
<b>Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah</b>	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85.2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	22.202.897.556
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	5.345.657.901

#### D. Standar Penilaian Kinerja

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Kecamatan Kedungkandang Kota Malang maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 2.6 Standar Pencapaian**

NILAI %	Pencapaian
110 Keatas	Sangat tercapai / Sangat berhasil
$90 \leq x < 110$	Tercapai / Berhasil
$60 \leq x < 90$	Cukup tercapai / Cukup berhasil
$x < 60$	Tidak tercapai / Tidak berhasil

# BABI III

# AKUNTABILITAS

# KINERJA



## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Kecamatan Kedungkandang Kota Malang selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban pelaporan melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kedungkandang Kota Malang yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Tahun 2018-2019 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan Kecamatan Kedungkandang

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi.**

Kinerja Kecamatan Kedungkandang dan Kebudayaan diukur dari pencapaian perjanjian kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Tahun 2023 pada seluruh sasaran strategis. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut

## 1. Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Hasil Pengukuran atas pencapaian kinerja tahun 2023 sebagaimana tabel berikut.

**Tabel. 3.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Keterangan
<b>Terwujud nya Kecamatan Yang Profesional dan Akuntabel</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	80.04	91.24	113.99%	Hasil Survei sampai dengan tingkat Kelurahan
<b>Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas</b>	Nilai Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	80	84.49	105.61%	Realisasi nilai IPMas adalah hasil survei pada tahun 2023 yang dilakukan oleh Bappeda
<b>Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara Terpadu</b>	Nilai Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik	3.65	4.46	122.19%	Realisasi nilai IKLI adalah hasil survei pada tahun 2023 yang dilakukan oleh Bappeda
<b>Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah</b>	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85.2	86.6	101.64%	Realisasi nilai SAKIP adalah hasil Penilaian pada tahun 2022 yang dilakukan oleh Inspektorat di tahun 2023
<b>Rata-Rata Capaian</b>				<b>109.82%</b>	

Dari tabel capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: Sasaran strategis **“Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan komunitas”** dengan Indikator Nilai Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)” mencapai 105.61%. sedangkan sasaran strategis **“Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara Terpadu”** dengan indikator kinerja Nilai Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik telah tercapai sebesar 122.19%, dan Sasaran strategis **“Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah”** dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah tercapai 101,64%.

## 2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023

Adapun Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018- 2023 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel. 3.2 Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kondisi awal	REALISASI KINERJA					Kondisi awal	CAPAIAN KINERJA				
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Terwujudnya Kecamatan Yang Profesional dan Akuntabel</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	75.00	88.30	81.64	75.5	95.35	91.24	100%	116.22%	102%	94.38%	118.74%	<b>113.99%</b>
<b>Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas</b>	Nilai Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	0	83.47	83,12	74.47	83.93	84.49	0	124.44%	114,65%	99,29%	108,30%	105.61%
<b>Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara Terpadu</b>	Nilai Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik	3.5	3.91	3.91	4.02	4.28	4.46	100%	133,33%	117,98%	120%	122,29%	122.19%
<b>Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah</b>	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74.86	70.03	75,72	77,95	85.1	86.6	100%	130,25%	94,64%	97,41%	106,36%	101.64%
	Rata-Rata								129,34%	109,09%	105,57%	112,32%	109.82%

Pengukuran kinerja dari tahun 2019-2023 untuk menunjukkan peningkatan/penurunan kinerja dapat dilihat dari tabel di atas. Adapun perbandingan untuk setiap sasaran strategis dan indikator kerjanya adalah sebagai berikut :

- Sasaran strategis : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas

Indikator kinerja : Nilai Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) (Mengalami Kenaikan 0.56%).
- Sasaran strategis : Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara Terpadu

Indikator kinerja : Nilai Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik (Mengalami Kenaikan 0.18%)
- Sasaran strategis : Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah

Indikator kinerja : Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Mengalami kenaikan 1.5%)

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis.

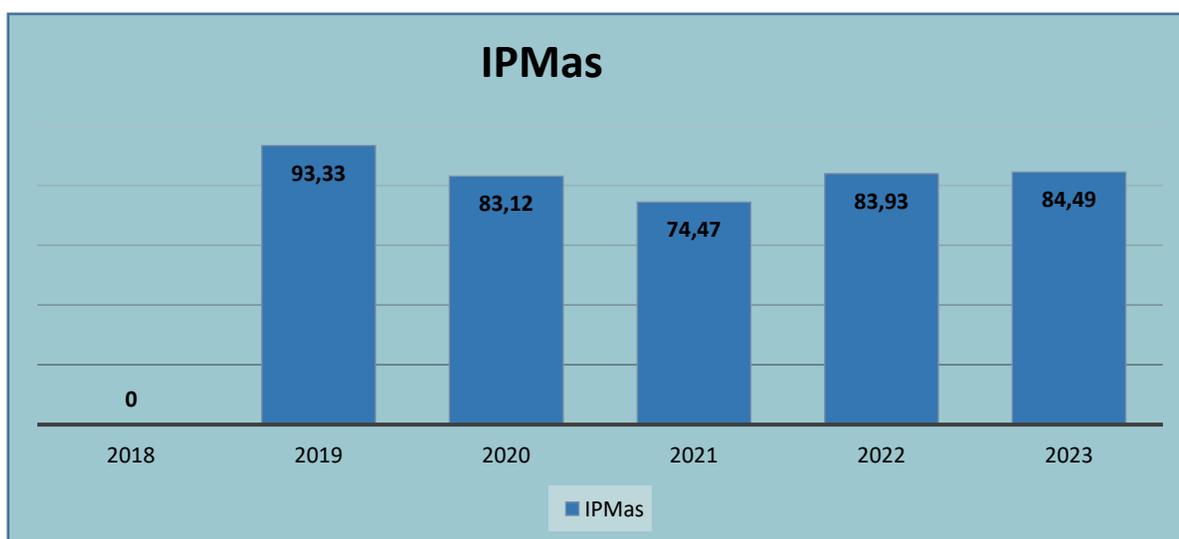
Analisa berikutnya untuk melakukan pengukuran capaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Pengukuran Realisasi Kinerja dengan mengacu Tabulasi Target Jangka Menengah sebagaimana dalam Rencana Strategis Tahun 2018-2023, sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

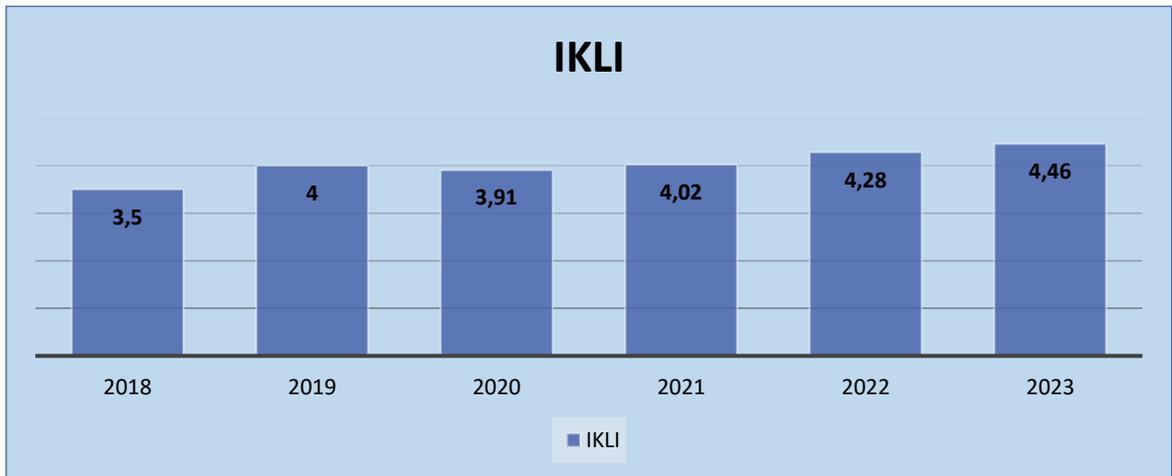
**Tabel 3.3. Realisasi Kinerja Yang Mengacu Pada Target Jangka Menengah Rensta**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi Kinerja					
				2023	2018	2019	2020	2021	2022
	Terwujud nya Kecamatan Yang Profesional dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	80.04	75.00	76.00	80	80	80.03	80.04
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas	Nilai Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	80	0	93.33	83,12	74.47	83.93	84.49
2	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara Terpadu	Nilai Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik	3.65	3,5	4.00	3.91	4.02	4.28	4.46
3	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85.2	74.86	70.03	75,72	77,95	85.1	86.6

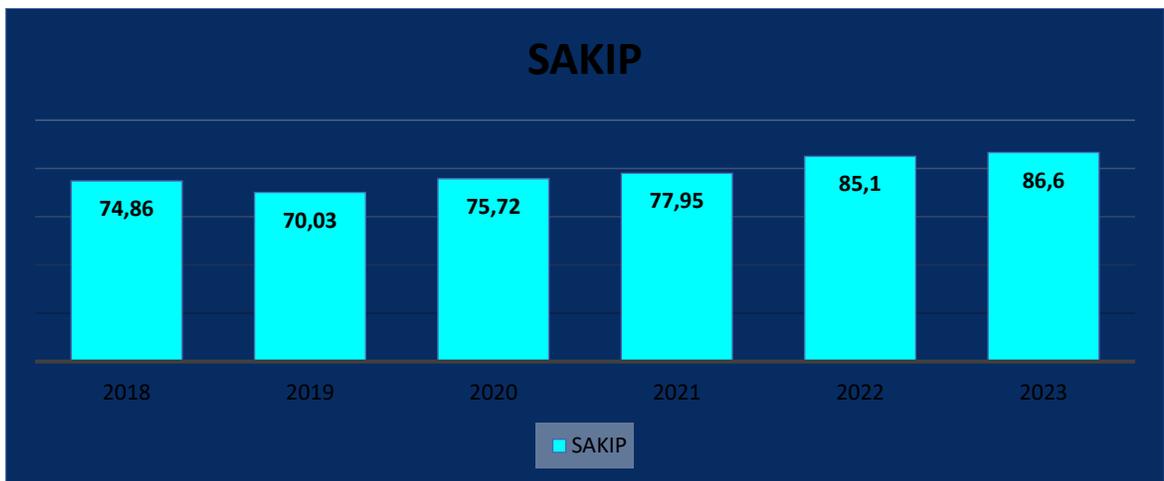
**Gambar 2. Capaian Realisasi Nilai Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)**



**Gambar 3. Capaian Realisasi Nilai Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik (IKLI)**



**Gambar 4. Capaian Realisasi Nilai SAKIP Perangkat Daerah**



**4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)**

A. Realisasi Kinerja dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM)/Standar Nasional lainnya

**Tabel 3.4. Realisasi kinerja dan Standart Pelayanan Minimal/Standar Nasional lainnya**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2022	Standar Nasional	
				Target 2022	Realisasi 2022
1	2	2	4	5	6

Dikarenakan Kecamatan tidak melaksanakan urusan wajib layanan dasar, sehingga tidak ada indikator SPM.

**Tabel 3.5.**  
**Realisasi kinerja dan Standart Pelayanan Minimal/Standar Nasional lainnya**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Propinsi
			2023	2023
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas	Nilai Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	84.49	74.65
2	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara Terpadu	Nilai Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik	4.46	3.8
3	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86.6	83.89

### 5. Analisa Penyebab keberhasilan/ Kegagalan.

Pengukuran pencapaian kinerja digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Evaluasi dan analisis kinerja terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan sangat penting dilaksanakan guna memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Hal ini bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/ kegiatan di masa yang akan datang.

Adapun keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang telah di perjanjikan adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.6 Keberhasilan/Kegagalan Capaian Indikator Kinerja Utama**

<b>Terwujud nya Kecamatan Yang Profesional dan Akuntabel</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	80.04	91.24	113.99%	Sangat tercapai /Sangat berhasil
<b>Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas</b>	Nilai Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	80	84.49	105.61%	Tercapai / Berhasil
<b>Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara Terpadu</b>	Nilai Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik	3.65	4.46	122.19%	Sangat tercapai /Sangat berhasil
<b>Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah</b>	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85.2	86.6	101.64%	Tercapai / Berhasil
<b>Rata-Rata Capaian</b>				<b>109.82%</b>	Tercapai / Berhasil

Berdasarkan tabel 3.6 di atas, maka dapat dilihat bahwa sasaran strategis:

Tujuan : Terwujudnya Kecamatan Yang Profesional dan Akuntabel dengan capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah, (mencapai 112.6%, realisasi tujuan sebesar 91,24 dari target 81.00) dengan kategori SANGAT BERHASIL sesuai target pada Renstra melalui dukungan pencapaian kinerja sasaran strategis yang dicapai setiap tahunnya.

- 1) Sasaran strategis “Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan komunitas” dengan Indikator Nilai Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) mencapai 105.61%. Indikator tersebut dapat terlaksana melalui optimalnya kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan telah mulai diatasi dengan melakukan perencanaan kegiatan yang berbasis outcome serta meningkatkan kompetensi aparatur. Sementara, penancangan kelurahan siaga yang ditopang oleh LINMAS yang terus digalakkan. Hal ini berpengaruh terhadap tingkat keberdayaan masyarakat dari sisi sosial. Indikator: Indeks Pemberdayaan Masyarakat (IPMas) Kecamatan terealisasi 84.49 dari target 80.00 dengan kategori BERHASIL.
- 2) Sasaran strategis “Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara Terpadu” dengan indikator kinerja Nilai Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik telah tercapai sebesar 122.19% Faktor pendukung keberhasilan adalah adanya alokasi anggaran khusus untuk program peningkatan sarana prasarana kelurahan melalui usulan masyarakat maupun Pokok Pikiran dari DPRD sehingga sarana prasarana di wilayah banyak yang diakomodir. Indikator: Indeks Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik terealisasi sebesar 4,46 dari target 3.65 dengan kategori SANGAT BERHASIL.
- 3) Sasaran strategis “Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah” dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah tercapai 101,64%. Beberapa terobosan baru dalam rangka meningkatkan pelayanan dan meningkatkan nilai SAKIP telah dilaksanakan pada Tahun 2023. Misalnya, dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan aparatur, Kecamatan Kedungkandang menerapkan penilaian kinerja untuk setiap unit kerja setiap bulan melalui Aplikasi Ekinerja. Penilaian ini dipergunakan untuk melakukan evaluasi berkala sehingga memungkinkan untuk menyusun strategi pencapaian sasaran

dan menemukan solusi atas permasalahan dan hambatan-hambatan yang ada. Indikator Nilai SAKIP perangkat daerah telah terealisasi 86.6 dari target sebesar 85.2 dengan kategori BERHASIL.

## 6. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumberdaya

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditargetkan dalam Renstra. Adapun sumber daya yang dimiliki Kecamatan Kedungkandang Kota Malang guna mencapai target sasaran strategis adalah sumber daya manusia dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 untuk melaksanakan kegiatan sehingga target dalam sasaran strategis Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dapat tercapai. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian kinerja dengan capaian anggaran sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.7. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Anggaran**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		Ratio efisiensi	
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi		Capaian (%)
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas	Nilai Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	80	84.49	105.61%	20.427.808.557	20.115.712.765	98,47%	107,14%
Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara Terpadu	Nilai Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik	3.65	4.46	122.19%	9.413.319.935	9.322.999.176	99,04%	123,15%
Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85.2	86.6	101.64%	27.548.555.457	23.595.313.675	85,65%	117,37%

Catatan: > 100%, maka penggunaan dana efektif  
< 100%, maka penggunaan dana belum efektif

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa sudah ada efisiensi anggaran dan efektifitas penggunaan dana yang berdasarkan kinerja.

- 1) Indikator Nilai Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) dengan capaian kinerja 105.61% dan capaian anggaran 98.47%, menunjukkan ada ratio efisiensi anggaran 107.14%;
- 2) Indikator Nilai Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik dengan capaian kinerja 122.19% dan capaian anggaran 99.04%, menunjukkan bahwa ratio efisiensi anggaran 123.15%;
- 3) Indikator Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan capaian kinerja 101.64% dan capaian anggaran 85.65%, menunjukkan bahwa ratio efisiensi anggaran 117.37%.

#### **7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Kecamatan Kedungkandang Kota Malang telah membuat program guna mendukung indikator kinerja utama. Rencana program dan indikator kinerja yang disusun pada dokumen Renstra telah dirumuskan agar selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Berikut realisasi kinerja program yang telah dilaksanakan pada Tahun 2023.

## A. Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.8. Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sasaran Srtategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rencana Tindak lanjut
<b>Meningkat nya Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas</b>	Indeks Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik	105.61%	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan	34 %	100 %	294,12%	
<b>Meningkat nya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara Terpadu</b>	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kecamatan	122.19%	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir	43 %	53.76 %	125.02%	
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	94 %	100 %	106.38%	
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan melalui Forkopimcam	100 %	100 %	100%	
<b>Meningkat nya kinerja pelayanan perangkat daerah</b>	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	101.64%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	95 %	100 %	105.26%	
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	IKM Pelayanan Perangkat Daerah	80.04 Angka	85 Angka	106.20%	

**Tabel 3.9. Analisa Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Program Kegiatan**

Program	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rencana Tindak lanjut
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<b>Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan</b>	294,12 %	<b>Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan</b>	<b>34 %</b>	<b>100 %</b>	294,12%	
			Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 laporan	12 laporan	100,00%	
			Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Arjowinangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	20 Unit	100,00%	
			Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bumiayu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	30 Unit	30 Unit	100,00%	
			Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Buring	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	100,00%	
			Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Cemorokandang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17 Unit	17 Unit	100,00%	
			Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kedungkandang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	26 Unit	26 Unit	100,00%	
			Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kotalama	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	34 Unit	34 Unit	100,00%	
			Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lesanpuro	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	100,00%	
			Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Madyopuro	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	15 Unit	100,00%	
			Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mergosono	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	6 Unit	100,00%	
			Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sawojajar	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	40 Unit	40 Unit	100,00%	
			Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tlogowaru	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	19 Unit	19 Unit	100,00%	
			Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Wonokoyo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	100,00%	

Program	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rencana Tindak lanjut
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<b>Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir</b>	125,02 %	<b>Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Persentase peningkatan lembaga ekonomi dan lembaga kemasyarakatan yang aktif</b>	<b>90 %</b>	<b>90 %</b>	100,00%	
			Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 lembaga	10 lembaga	100,00%	
			Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Persentase peningkatan lembaga ekonomi dan lembaga kemasyarakatan yang aktif (Kelurahan Arjowinangun)	19 lembaga	19 lembaga	100,00%	
			Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Bumiayu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	22 lembaga	22 lembaga	100,00%	
			Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Buring	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15 lembaga	15 lembaga	100,00%	
			Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Cemorokandang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15 lembaga	15 lembaga	100,00%	
			Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Kedungkandang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	18 lembaga	18 lembaga	100,00%	
			Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Kotalama	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	18 lembaga	18 lembaga	100,00%	
			Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Lesanpuro	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	16 lembaga	16 lembaga	100,00%	

Program	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rencana Tindak lanjut
			Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Madyopuro	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	18 lembaga	18 lembaga	100,00%	
			Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Mergosono	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17 lembaga	17 lembaga	100,00%	
			Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sawojajar	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	18 lembaga	18 lembaga	100,00%	
			Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Tlogowaru	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	18 lembaga	18 lembaga	100,00%	
			Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Wonokoyo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	27 lembaga	27 lembaga	100,00%	
			<b>Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Persentase peningkatan lembaga ekonomi dan lembaga kemasyarakatan yang aktif</b>	<b>90 %</b>	<b>90 %</b>	100,00%	
			Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 kelompok	8 kelompok	100,00%	
			Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Arjowinangun	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 kelompok	3 kelompok	100,00%	
			Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bumiayu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 kelompok	12 kelompok	100,00%	
			Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Buring	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 kelompok	4 kelompok	100,00%	

Program	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rencana Tindak lanjut
			Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cemorokandang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 kelom pok	7 kelom pok	100,00%	
			Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kedungkandang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 kelom pok	3 kelom pok	100,00%	
			Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kotalama	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 kelom pok	4 kelom pok	100,00%	
			Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lesanpuro	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 kelom pok	7 kelom pok	100,00%	
			Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Madyopuro	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 kelom pok	6 kelom pok	100,00%	
			Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mergosono	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 kelom pok	9 kelom pok	100,00%	
			Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sawojajar	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 kelom pok	7 kelom pok	100,00%	
			Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tlogowaru	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 kelom pok	9 kelom pok	100,00%	
			Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Wonokoyo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 kelom pok	3 kelom pok	100,00%	
			<b>Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persentase peningkatan lembaga ekonomi dan lembaga kemasyarakatan yang aktif</b>	<b>90 %</b>	<b>90 %</b>	100,00%	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8 lembaga	8 lembaga	100,00%	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan kelurahan Arjowinangun	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 lembaga	9 lembaga	100,00%	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan kelurahan bumiayu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 lembaga	4 lembaga	100,00%	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan kelurahan buring	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 lembaga	4 lembaga	100,00%	

Program	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rencana Tindak lanjut
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan kelurahan Cemorokandang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 lembaga	6 lembaga	100,00%	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan kelurahan Kedungkandang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	10 lembaga	10 lembaga	100,00%	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan kelurahan Kotalama	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 lembaga	2 lembaga	100,00%	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan kelurahan Lesanpuro	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 lembaga	9 lembaga	100,00%	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan kelurahan Madyopuro	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 lembaga	4 lembaga	100,00%	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan kelurahan Mergosono	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8 lembaga	8 lembaga	100,00%	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan kelurahan Sawojajar	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 lembaga	9 lembaga	100,00%	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan kelurahan Tlogowaru	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8 lembaga	8 lembaga	100,00%	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan kelurahan Wonokoyo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8 lembaga	8 lembaga	100,00%	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<b>Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan</b>	106,38 %	<b>Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Cakupan wilayah yang termonitoring (unit RT)</b>	<b>930 RT</b>	<b>919 RT</b>	98,82%	
			Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	100,00%	
			Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Arjowinangun	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	100,00%	

Program	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rencana Tindak lanjut
			Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan bumiayu	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	100,00%	
			Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan buring	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	100,00%	
			Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Cemorokandang	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	100,00%	
			Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Kedungkandang	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	100,00%	
			Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Kotalama	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	100,00%	
			Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Lesanpuro	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	100,00%	
			Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Madyopuro	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	100,00%	
			Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Mergosono	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	100,00%	

Program	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rencana Tindak lanjut
			Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Sawojajar	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	100,00%	
			Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Tlogowaru	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	100,00%	
			Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Wonokoyo	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	100,00%	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	<b>Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu</b>	105,26 %	<b>Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase dokumen perencanaan keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	100,00%	
			Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%	
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	0 Dokumen	0,00%	pergeseran pada perubahan anggaran
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	-
			Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%	Tidak ada perubahan SOP Kecamatan, maka tidak direalisasikan
			<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase dokumen perencanaan keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	100,00%	

Program	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rencana Tindak lanjut
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan	145 Orang	123 Orang	84,83%	Berkoordinasi dengan BKPSDM untuk memenuhi kekurangan PNS yang pensiun
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	-
			<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik</b>	<b>80 %</b>	<b>100 %</b>	125,00%	
			Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	2 Unit	2 Unit	100,00%	-
			Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	15 Unit	100,00%	-
			<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik</b>	<b>80</b>	<b>85</b>	106,25%	
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	100,00%	-
			<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai Survey Kepuasan Internal</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	100,00%	
			Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	145 Orang	123 Orang	84,83%	Berkoordinasi dengan BKPSDM untuk memenuhi PNS yang pensiun
			<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai Survey Kepuasan Internal</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	100,00%	
			Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100,00%	
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100,00%	
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100,00%	
			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100,00%	

Program	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rencana Tindak lanjut
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	100,00%	
			<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Nilai Survey Kepuasan Internal</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	100,00%	
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	100,00%	
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	100,00%	
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	100,00%	
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	100,00%	
			<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik</b>	<b>80</b>	<b>85</b>	106,25%	
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	100,00%	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<b>IKM Pelayanan Perangkat Daerah</b>	106,20 %	<b>Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>prosentase penyelesaian layanan berdasarkan pelimpahan kewenangan</b>	<b>80 %</b>	<b>100 %</b>	125,00%	
			Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%	
			Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan Arjowinangun	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 laporan	12 laporan	100,00%	
			Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan Bumiayu	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 laporan	12 laporan	100,00%	

Program	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rencana Tindak lanjut
			Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan kelurahan Buring	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%	
			Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan kelurahan Cemorokandang	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%	
			Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan kelurahan Kedungkandang	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 laporan	12 laporan	100,00%	
			Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan kelurahan Kotalama	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 laporan	12 laporan	100,00%	
			Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan kelurahan Lesanpuro	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%	
			Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan kelurahan Madyopuro	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%	
			Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan kelurahan Mergosono	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%	
			Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan kelurahan Sawojajar	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%	
			Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan kelurahan Tlogowaru	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%	
			Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan kelurahan Wonokoyo	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%	

Program	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rencana Tindak lanjut
			<b>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>Jumlah dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>3 Dokumen</b>	100,00%	
			Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	3 Dokumen	0 Dokumen	0,00%	melakukan sosialisasi dan pendampingan penyusunan data monografi dan profil kelurahan
			Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan kelurahan Arjowinangun	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	3 Dokumen	0 Dokumen	0,00%	Meng update atau memperbaiki data profil dan monografi
			Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan kelurahan Bumiayu	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%	-
			Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan kelurahan Cemorokandang	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%	-
			Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan kelurahan Kedungkandang	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	3 Dokumen	0 Dokumen	0,00%	Meng update atau memperbaiki data profil dan monografi
			Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan kelurahan Kotalama	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	3 Dokumen	0 Dokumen	0,00%	Meng update atau memperbaiki data profil dan monografi
			Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan kelurahan Lesanpuro	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	3 Dokumen	0 Dokumen	0,00%	mengupdate atau memperbaiki data profil dan monografi
			Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Madyopuro	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%	-
			Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Mergosono	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%	-

Program	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rencana Tindak lanjut
			Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan kelurahan Sawojajar	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%	-
			Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan kelurahan Tlogowaru	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	3 Dokumen	0 Dokumen	0,00%	Mengupdate atau memperbaharui data profil dan monografi
			Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan kelurahan Wonokoyo	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%	-
			Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Buring	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%	-
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<b>Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan melalui Forkopimcam</b>	100,00 %	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Jumlah Koordinasi</b>	<b>5 Kali</b>	<b>5 Kali</b>	100,00%	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00%	

**1) Penjelasan Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja sebagaimana berikut:**

Sasaran 1 : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan komunitas

Indikator : Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kecamatan, dengan target 80 telah berhasil tercapai sebesar 84.49 atau tercapai 105.61%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program:

- 1) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Indikator Program Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir Target 43% tercapai 53,76% dengan capaian kinerja 294,12%

- 2) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Indikator Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan, Target 94% terealisasi 100%, dengan capaian kinerja 106.38%
- 3) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Indikator Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan melalui Forkopimcam, Target 100% terealisasi 100% sehingga tercapai 100%.

Sasaran 2 : Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara Terpadu.

Indikator : Indeks Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik, dengan target 3.65 telah berhasil tercapai sebesar 4.46 atau tercapai 122.19%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program: Program Pemberdayaan Masyarakat, dengan Indikator Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan, Target 34% terealisasi 100%, dengan capaian kinerja 294.12%

Sasaran 3 : Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah

Indikator : Nilai SAKIP Perangkat Daerah, dengan target 85.2 telah berhasil tercapai sebesar 86.6 atau tercapai 101.64%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program:

1. Program: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Indikator Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu, Target 95% terealisasi 100%, dengan capaian kinerja 105.26%
2. Program: Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan Indikator IKM Pelayanan Perangkat Daerah, Target 80.04 terealisasi 85%, dengan capaian kinerja 106.20%

## 2) Upaya perbaikan pada perencanaan berikutnya

Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Kedungkandang dan wujud transparansi pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja Kecamatan Kedungkandang.

Dalam rangka peningkatan Kinerja Kecamatan Kedungkandang diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Kedungkandang Tahun 2023, maka perlu dilakukan beberapa strategi dalam mencapai tujuan Kecamatan Kedungkandang sebagai berikut:

- 1) Mensinergikan program pelayanan dengan OPD yang menjadi tanggung jawab Kecamatan dan Kelurahan;
- 2) Keselarasan data kependudukan;
- 3) Keselarasan data penerima bantuan pemerintah;
- 4) Menyelaraskan Road Map Kota Malang sebagai Kota Produktif dan Berdaya Saing berbasis Ekonomi Kreatif dengan program di Kecamatan Kedungkandang;
- 5) Meningkatkan peran serta lembaga sosial dan komunitas;
- 6) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pemerintah;
- 7) Mensinergikan program pembangunan infrastruktur OPD dengan program di Kecamatan dan Kelurahan;
- 8) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengusulan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.

b. Adapun arah kebijakan Kecamatan Kedungkandang adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan koordinasi antar instansi, baik instansi vertical maupun horizontal terkait sarana dan prasarana di Kecamatan Kedungkandang;
- 2) Penerapan sistem manajemen pelayanan yang mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan, yang lebih cepat, nyaman, aman, jelas serta terjaga profesionalisme petugas pelayanan;

- 3) Menciptakan budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas;
- 4) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait masalah kependudukan dan pencatatan sipil serta mensinergikan basis data kependudukan;
- 5) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial untuk mengoptimalkan layanan dasar kesehatan dan kemiskinan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
- 6) Meningkatkan koordinasi dengan OPD yang membidangi Ekonomi kreatif;
- 7) Meningkatkan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam bidang ekonomi kreatif, lingkungan, kemasyarakatan, dan keagamaan;
- 8) Mengintegrasikan basis data UMKM antara OPD yang membidangi dengan Kecamatan Kedungkandang;
- 9) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan ketrampilan serta melakukan pendampingan sehingga terwujud pembinaan yang berkelanjutan.
- 10) Meningkatkan peran serta lembaga sosial masyarakat;
- 11) Meningkatkan peran serta Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- 12) Meningkatkan peran serta RT dan Linmas;
- 13) Meningkatkan indeks rasa aman, gotong royong dan toleransi;
- 14) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana lingkungan;
- 15) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam peningkatan kualitas sarana dan prasarana lingkungan;
- 16) Menciptakan stabilitas keamanan wilayah Kecamatan Kedungkandang.

## **B. Realisasi Anggaran.**

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2023 sebesar 92.56% dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 57.389.082.949 dan terealisasi sebesar Rp. 53.121.371.616. Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.10. Realisasi Anggaran per Subkegiatan Tahun 2023**

Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Anggaran	Realisasi	%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan	26.512.655.892	26.163.050.968	98,68%
Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan	9.413.319.935	9.322.999.176	99,04%
Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	218.781.635	210.292.680	96,12%
Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Arjowinangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	612.790.000	607.957.000	99,21%
Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bumiayu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	840.840.000	835.674.000	99,39%
Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Buring	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	562.275.000	527.555.000	93,83%
Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Cemorokandang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	604.045.000	602.845.000	99,80%
Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kedungkandang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1.067.700.500	1.060.173.750	99,30%
Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kotalama	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1.097.015.000	1.056.489.920	96,31%
Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lesanpuro	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	657.231.800	656.885.500	99,95%
Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Madyopuro	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1.185.570.000	1.185.562.400	100%
Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mergosono	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	506.941.000	506.806.000	99,97%
Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sawojajar	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	855.670.000	850.019.590	99,34%
Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tlogowaru	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	563.560.000	563.044.960	99,91%
Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Wonokoyo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	640.900.000	639.693.376	99,81%

Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Anggaran	Realisasi	%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir	17.099.335.957	16.840.051.792	98,48%
Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase peningkatan lembaga ekonomi dan lembaga kemasyarakatan yang aktif	226.260.450	219.621.562	97,07%
Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	61.800.000	61.800.000	100%
Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Persentase peningkatan lembaga ekonomi dan lembaga kemasyarakatan yang aktif (Kelurahan Arjowinangun)	9.350.000	8.748.000	93,56%
Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Bumiayu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bumiayu	4.350.000	4.350.000	100%
Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Buring	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Buring	14.650.000	11.750.000	80,20%
Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Cemorokandang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Cemorokandang	18.191.250	18.116.250	99,59%
Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Kedungkandang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kedungkandang	12.000.000	11.435.000	95,29%
Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Kotalama	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kotalama	13.775.000	13.163.850	95,56%
Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Lesanpuro	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lesanpuro	6.003.200	5.996.000	99,88%
Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Madyopuro	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Madyopuro	18.080.400	18.080.000	100%
Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Mergosono	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mergosono	16.070.000	15.950.000	99,25%

Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Anggaran	Realisasi	%
Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sawojajar	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sawojajar	13.491.000	13.491.000	100%
Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Tlogowaru	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tlogowaru	10.000.000	8.357.750	83,58%
Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Wonokoyo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wonokoyo	28.499.600	28.383.712	99,59%
Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase peningkatan lembaga ekonomi dan lembaga kemasyarakatan yang aktif	8.840.331.970	8.698.267.913	98,39%
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	199.599.600	190.696.758	95,54%
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Arjowinangun	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			#DIV/0!
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bumiayu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.039.900.000	1.027.400.000	98,80%
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Buring	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	888.700.000	881.834.250	99,23%
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cemorokandang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	690.590.000	602.845.000	87,29%
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kedungkandang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	683.100.000	683.100.000	100%
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kotalama	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.068.725.000	1.060.900.000	99,27%
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lesanpuro	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	708.857.770	706.256.905	99,63%
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Madyopuro	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	825.000.000	825.000.000	100%
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mergosono	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	634.772.100	633.570.000	99,81%
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sawojajar	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	961.428.900	961.140.000	99,97%
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tlogowaru	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	572.058.600	557.925.000	97,53%
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Wonokoyo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	567.600.000	567.600.000	100%

Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Anggaran	Realisasi	%
Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase peningkatan lembaga ekonomi dan lembaga kemasyarakatan yang aktif	8.032.743.537	7.922.162.317	98,62%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	153.127.800	143.184.945	93,51%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan kelurahan Arjowinangun	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	660.120.000	645.094.000	97,72%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan kelurahan bumiayu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	580.200.000	577.054.920	99,46%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan kelurahan buring	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	408.000.000	408.000.000	100%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan kelurahan Cemorokandang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	646.401.587	646.122.400	99,96%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan kelurahan Kedungkandang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	405.050.000	403.527.400	99,62%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan kelurahan Kotalama	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1.012.125.000	1.006.557.177	99,45%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan kelurahan Lesanpuro	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	678.559.600	678.506.500	99,99%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan kelurahan Madyopuro	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	973.200.000	973.200.000	100%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan kelurahan Mergosono	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	707.623.350	695.578.410	98,30%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan kelurahan Sawojajar	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	981.598.400	971.470.900	98,97%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan kelurahan Tlogowaru	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	438.211.400	399.815.340	91,24%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan kelurahan Wonokoyo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	388.526.400	374.050.325	96,27%
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	2.656.573.000	2.605.555.211	98,08%
Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan wilayah yang termonitoring (unit RT)	2.656.573.000	2.605.555.211	98,08%
Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	586.385.200	566.148.200	96,55%
Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Arjowinangun	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	158.400.000	157.194.900	99,24%

Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Anggaran	Realisasi	%
Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan bumiayu	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	170.400.000	170.400.000	100%
Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan buring	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	177.318.400	176.752.000	99,68%
Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Cemorokandang	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	146.650.000	145.796.000	99,42%
Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Kedungkandang	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	151.200.000	141.600.000	93,65%
Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Kotalama	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	239.100.000	237.726.625	99,43%
Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Lesanpuro	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	172.500.000	170.932.800	99,09%
Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Madyopuro	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	196.699.600	196.076.000	99,68%
Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Mergosono	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	171.309.800	171.270.000	99,98%
Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Sawojajar	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	180.210.000	177.358.686	98,42%
Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Tlogowaru	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	148.600.000	139.700.000	94,01%

Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Anggaran	Realisasi	%
Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Wonokoyo	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	157.800.000	154.600.000	97,97%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	22.202.897.556	18.710.625.849	84,27%
Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	7.785.000	6.514.250	83,68%
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.545.000	2.406.500	94,56%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.020.000	2.007.750	99,39%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.100.000	2.100.000	100%
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.120.000	-	0,00%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	20.693.617.509	17.445.031.710	84,30%
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan	20.543.983.509	17.344.839.160	84,43%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	149.634.000	100.192.550	66,96%
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	175.168.300	172.110.905	98,25%
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	73.550.000	73.550.000	##### #
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	101.618.300	98.560.905	96,99%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	191.400.000	191.253.000	99,92%
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	191.400.000	191.253.000	99,92%
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Internal	58.800.000	52.556.100	89,38%
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	58.800.000	52.556.100	89,38%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Internal	620.247.775	461.841.770	74,46%
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14.792.000	14.562.437	98,45%
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	61.998.500	55.506.175	89,53%

Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Anggaran	Realisasi	%
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	80.446.180	74.267.248	92,32%
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	18.619.095	11.202.500	60,17%
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	9.000.000	4.236.000	47,07%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	435.392.000	302.067.410	69,38%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Survey Kepuasan Internal	375.520.972	317.290.409	84,49%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.100.000	10.367.800	68,66%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	95.502.400	48.775.752	51,07%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	23.600.000	17.215.000	72,94%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	241.318.572	240.931.857	99,84%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80.358.000	64.027.705	79,68%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	80.358.000	64.027.705	79,68%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Pelayanan Perangkat Daerah	5.260.388.303	4.784.384.350	90,95%
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	prosentase penyelesaian layanan berdasarkan pelimpahan kewenangan	5.090.826.838	4.669.121.624	91,72%
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	117.720.545	67.471.250	57,31%
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan kelurahan Arjowinangun	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	610.570.000	593.363.309	97,18%
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan kelurahan Bumiayu	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	475.972.000	430.523.351	90,45%
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan kelurahan Buring	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	316.467.000	299.350.669	94,59%
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan kelurahan Cemorokandang	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	348.464.263	336.410.466	96,54%
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan kelurahan Kedungkandang	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	286.897.000	267.452.707	93,22%

Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Anggaran	Realisasi	%
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan kelurahan Kotalama	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	326.355.835	224.034.544	68,65%
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan kelurahan Lesanpuro	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	451.979.441	437.551.883	96,81%
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan kelurahan Madyopuro	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	450.173.202	430.041.578	95,53%
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan kelurahan Mergosono	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	458.095.750	407.662.131	88,99%
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan kelurahan Sawojajar	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	450.173.202	430.041.578	95,53%
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan kelurahan Tlogowaru	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	511.894.600	474.034.715	92,60%
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan kelurahan Wonokoyo	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	286.064.000	271.183.443	94,80%
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	169.561.465	115.262.726	67,98%
Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	10.009.600	-	0,00%
Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan kelurahan Arjowinangun	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	6.800.000	-	0,00%
Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan kelurahan Bumiayu	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	4.500.000	-	0,00%
Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan kelurahan Cemorokandang	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	847.900	847.700	99,98%
Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan kelurahan Kedungkandang	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	8.000.000	-	0,00%
Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan kelurahan Kotalama	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1.449.165	-	0,00%
Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan kelurahan Lesanpuro	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	-	-	0,00%
Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan kelurahan Madyopuro	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	17.347.200	16.222.500	93,52%

Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Anggaran	Realisasi	%
Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan kelurahan Mergosono	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	18.928.000	17.755.000	93,80%
Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan kelurahan Sawojajar	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	26.180.000	23.789.526	90,87%
Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan kelurahan Tlogowaru	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	15.000.000	-	0,00%
Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan kelurahan Wonokoyo	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	8.190.000	6.340.000	77,41%
Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Buring	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Buring	52.309.600	50.308.000	96,17%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan melalui Forkopimcam	14.599.600	14.096.762	96,56%
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi	14.599.600	14.096.762	96,56%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	14.599.600	14.096.762	96,56%

# BABI IV PENUTUP

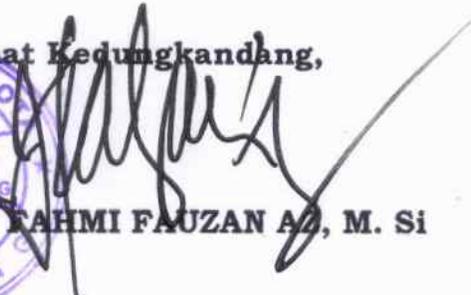


## BAB IV P E N U T U P

Pada hakekatnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kedungkandang merupakan pertanggungjawaban dari kinerja Camat yang telah dicapai tahun 2023 atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola Sumber Daya Manusia serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Camat terhadap penggunaan anggaran yang telah digunakan untuk kegiatan selama kurun waktu satu tahun baik yang bersifat fisik maupun non fisik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kedungkandang Anggaran 2023 ini dapat dikatakan BERHASIL, dimana hal ini dapat dilihat pada tabel di atas. Adapun dampak dan manfaat dari pelaksanaan dan kegiatan dimaksud masih berupa data kualitatif dan belum menunjukkan secara kuantitatif, hal tersebut dikarenakan banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi baik faktor internal maupun eksternal organisasi.

Secara khusus pembiayaan anggaran operasional yang diperlukan sangat mempengaruhi dalam pencapaian kinerja yang optimal, hal ini dapat dilihat dari hasil kinerja kebijakan teknis, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Instansi Kecamatan Kedungkandang pada Tahun Anggaran 2023, masih ada sebagian yang belum terselesaikan. Hal tersebut tidak lepas dari kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, baik dalam segi teknis maupun non teknis operasional. Kedepan diharapkan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan juga harus disertai dengan dukungan dana dari Pemerintah Kota Malang sehingga sasaran sebagaimana tercantum pada RPJMD Kota Malang dapat tercapai.

  
Camat Kedungkandang,  
  
Drs. FAHMI FAUZAN AZ, M. Si

# LAMPIRAN



## DAFTAR LAMPIRAN

### 1) Matrik Renstra

XXV.IV-4

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

KECAMATAN KEDUNGKANDANG

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Terwujudnya Kecamatan Yang Profesional dan Akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	75,00	75,00	76,00	77,00	78,00	80,00	81,00	81,00
		Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai Sakip OPD	70,08	74,86	80,00	80,01	80,02	80,03	80,03	80,03
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMat) Kecamatan	0	0	70,00	72,5	75,00	77,5	80,00	80,00
		Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara Terpadu	Indeks Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik	100	75	60	65,00	67,00	70,00	73,00	73

## 2) Perjanjian Kinerja



PEMERINTAH KOTA MALANG

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAPTO WIBOWO, SH, M.Hum

Jabatan : CAMAT KEDUNGKANDANG

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Drs. H. SUTIAJI

Jabatan : WALIKOTA MALANG

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, 2 Januari 2023

WALIKOTA MALANG,

CAMAT KEDUNGKANDANG

Drs. H. SUTIAJI

  
SAPTO WIBOWO, SH, M. Hum  
Pembina  
NIP.19690521 199303 1 005

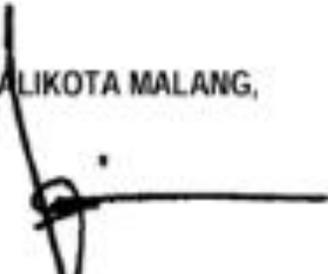
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpas Kota secara Terpadu	Indeks Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik	3.65
2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kecamatan	80.00
3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85.2

No.	Sasaran program	Indikator Program	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya konsistensi perencanaan sarana dan prasarana kewilayahan dengan pelaksanaannya	Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan	34%
2	Meningkatnya kualitas usulan sarana prasarana masyarakat dalam penanganan masalah sesuai prioritas	Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir	43%
3	Meningkatnya keaktifan dan peran lembaga kemasyarakatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	96%
4	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Rasio Linmas per RT	1
		Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan	94%
5	Meningkatnya pembinaan dan fasilitasi forum-forum atau koordinasi tingkat kecamatan	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan melalui Forkopimcam	100%
6	Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah	IKM Pelayanan Perangkat Daerah	80,4

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 22.823.033.176	PAD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 5.047.704.413	PAD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 27.326.421.760	PAD
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 1.957.925.000	PAD
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 14.599.600	PAD

WALIKOTA MALANG,

  
Drs. H. SUTIAJI

Malang, 2 Januari 2023

CAMAT KEDUNGKANDANG

  
SAPTO BOWO, SH, M. Hum  
Pembina  
NIP.19690521 199303 1 005



**PEMERINTAH KOTA MALANG**

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. FAHMI FAUZAN AZ, M. Si

Jabatan : CAMAT KEDUNGKANDANG

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Dr. Ir. WAHYU HIDAYAT, MM

Jabatan : Pj. WALIKOTA MALANG

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Malang, 29 September 2023

CAMAT KEDUNGKANDANG

  
Drs. FAHMI FAUZAN AZ, M. Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 49681123 199403 1 008

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpas Kota secara Terpadu	Indeks Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik	3.65
2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kecamatan	80.00
3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85.2

No.	Sasaran program	Indikator Program	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya konsistensi perencanaan sarana dan prasarana kewilayahan dengan pelaksanaannya	Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan	34%
2	Meningkatnya kualitas usulan sarana prasarana masyarakat dalam penanganan masalah sesuai prioritas	Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir	43%
3	Meningkatnya keaktifan dan peran lembaga kemasyarakatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	96%
4	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Rasio Linmas per RT	1
		Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan	94%
5	Meningkatnya pembinaan dan fasilitasi forum-forum atau koordinasi tingkat kecamatan	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan melalui Forkopimcam	100%
6	Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah	IKM Pelayanan Perangkat Daerah	80,4

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 22.202.897.556	PAD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 5.345.657.901	PAD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 27.169.955.892	PAD
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 2.656.573.000	PAD
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 14.599.600	PAD



Malang, 29 September 2023  
CAMAT KEDUNGKANDANG

  
Drs. FAHMI PAUZAN AZ, M. Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19681123 199403 1 008

### 3) Ringkasan Pengukuran Kinerja/ Rekap data pengukuran yang sesuai IKU

EVALUASI DAN MONITORING KINERJA PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2023  
KECAMATAN KEDUNGKANDANG  
TRIWULAN IV (Empat)

NO.	KINERJA UTAMA TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	REALISASI	PENCAPAIAN	PERMASALAHAN	RENCANA AKSI		MONITORING TINDAK LANJUT
				(5)/(4)			(6)	LANGKAH KERJA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)
	TUJUAN : TERWUJUDNYA KECAMATAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	80,04	91,24	113,99%	Realisasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat Semester I	Melaksanakan kegiatan sesuai yang telah direncanakan dalam DPA	Dokumen Survei (IKM)	Menyiapkan data pendukung yang diperlukandalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	85,2	86,6	101,64%	Hasil Penilaian SAKIP tahun 2023 oleh Inspektorat	Menindaklanjuti Rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023	Nilai SAKIP Kecamatan	Menindaklanjuti Rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023
2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Komunitas	Indeks Pembangunan masyarakat (IPMas) Kecamatan	80	84,49	105,61%	Realisasi nilai IPMas adalah hasil survei pada tahun 2023 yang dilakukan oleh Bappeda	-	Nilai IPMas Kecamatan	Hasil penilaian oleh Bappeda
3	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara Terpadu	Nilai Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik	3,65	4,46	122,19%	Realisasi nilai IKLI adalah hasil survei pada tahun 2023 yang dilakukan oleh Bappeda	-	Nilai IKLI Kecamatan	Hasil penilaian oleh Bappeda

Malang, 11 Desember 2023  
CAMAT KEDUNGKANDANG,

  
Dr. F. H. FAUZAN A. Z., M.Si  
Pembina/Tingkat I  
NIP. 19681123 199403 1 008

EVALUASI DAN MONITORING KINERJA PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2022  
KECAMATAN KEDUNGKANDANG  
TRIWULAN IV ( sd 9 DESEMBER 2022)

NO.	KINERJA UTAMA TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	REALISASI	PENCAPAIAN	PERMASALAHAN	RENCANA AKSI			MONITORING TINDAK LANJUT
				(5)/(4)			(6)	LANGKAH KERJA	OUTPUT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	TUJUAN : TERWUJUDNYA KECAMATAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	80,3	95,35	118,74%	-	Melaksanakan kegiatan sesuai yang telah direncanakan dalam DPA	Dokumen Survei (IKM)	-	-
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	80,01	85,1	106,36%	Hasil Penilaian SAKIP tahun 2022 oleh Inspektorat	Menindaklanjuti Rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022	Nilai SAKIP Kecamatan	Tahun 2023	Menindaklanjuti Rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022
2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Komunitas	Indeks Pembangunan masyarakat (IPMas) Kecamatan	77,5	74,47	96,09%	Realisasi nilai IPMas adalah hasil survei pada tahun 2021 yang dilakukan oleh Bappeda	Menyiapkan data pendukung diperlukan dalam Pelaksanaan Survei IPMas Tahun 2022	Nilai IPMas Kecamatan	Tahun 2023	Belum dilakukan penilaian oleh Bappeda
3	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara Terpadu	Nilai Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik	70	80,4	114,86%	Realisasi nilai IKLI adalah hasil survei pada tahun 2021 yang dilakukan oleh Bappeda	Menyiapkan data pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan Survei IKLI Tahun 2022	Nilai IKLI Kecamatan	Tahun 2023	Belum dilakukan penilaian oleh Bappeda

Malang, 12 Desember 2022  
CAMAT KEDUNGKANDANG,

  
SAPTO WIBOWO, SH, M.Hum  
Pembina  
NIP. 19690521 199303 1 005

**EVALUASI DAN MONITORING KINERJA PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2021**  
**KECAMATAN KEDUNGKANDANG**  
**TRIWULAN IV (OKTOBER, NOPEMBER, DESEMBER)**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PENCAPAIAN	PERMASALAHAN	RENCANA AKSI			MONITORING TINDAK LANJUT
				(5)/(4)			LANGKAH KERJA	OUTPUT	WAKTU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	TUJUAN : TERWUJUDNYA KECAMATAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	80	75,5	94,38%	Penilaian dilakukan dalam 2 kali semester ( semester 1 dan semester 2)	Melakukan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan Proses di masa Pandemi Covid 19	dokumen Survei (IKM)	Semester 2 tahun 2021	Mengevaluasi hasil penilaian pada semester 1, untuk memperbaiki kualitas layanan kepada Masyarakat di semester berikutnya
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	80,02	77,95	97,41%	Realisasi nilai SAKIP adalah hasil Penilaian pada tahun 2020 yang dilakukan oleh Inspektorat	Melakukan peningkatan kualitas data pendukung yang diperlukan dalam penialain SAKIP 2021	Nilai SAKIP Kecamatan	Tahun 2022	Belum dilakukan penilaian oleh Inspektorat
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Komunitas	Indeks Pembangunan masyarakat (IPMas) Kecamatan	75	83,12	110,83%	Realisasi nilai IPMas adalah hasil survei pada tahun 2020 yang dilakukan oleh Bappeda	Menyiapkan data pendukung yang diperlukan dalam Pelaksanaan Survei IPMas 2021	Nilai IPMas Kecamatan	Tahun 2022	Belum dilakukan penilaian oleh Bappeda
	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara Terpadu	Nilai Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik	67	76,69	114,46%	Realisasi nilai IKLI adalah hasil survei pada tahun 2020 yang dilakukan oleh Bappeda	Menyiapkan data pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan Survei IKLI 2021	Nilai IKLI Kecamatan	Tahun 2022	Belum dilakukan penilaian oleh Bappeda

Malang, 1 Nopember 2021

CAMAT KEDUNGKANDANG,

Drs. PRAYITNO, M.A.P

Pembina Tingkat I

NIP. 19671210 198809 1 002

**EVALUASI DAN MONITORING KINERJA PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2020**  
**KECAMATAN KEDUNGKANDANG**  
**TRIWULAN IV (OKTOBER, NOPEMBER, DESEMBER)**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PENCAPAIAN	PERMASALAHAN	RENCANA AKSI			MONITORING TINDAK LANJUT
				(5)/(4)			LANGKAH KERJA	OUTPUT	WAKTU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	TUJUAN : TERWUJUDNYA KECAMATAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	80	81,64	102%	Belum dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat oleh Kecamatan Kedungkandang	Melaksanakan kegiatan sesuai yang telah direncanakan dalam DPA	dokumen Survei (IKM)	direncanakan Bulan Juli dan Desember 2020	
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas	Nilai Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	72,5	83,12	114,65%		Menyiapkan data pendukung diperlukan dalam Pelaksanaan Survei IPMas 2020	Nilai IPMas Kecamatan		
	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara Terpadu	Nilai Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik	65,00	76,69	117,98%		Menyiapkan data pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan Survei IKLI	Nilai IKLI Kecamatan		
	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,01	75,72	94,64%	Hasil Penilaian SAKIP 2019, dilakukan pada bulan Agustus 2020	Menyiapkan data pendukung yang diperlukan dalam penialain SAKIP 2020	Nilai SAKIP Kecamatan		

Nilai SAKIP 2019

80,01	75,72	94,64%
-------	-------	--------

Malang, 9 Maret 2020

CAMAT KEDUNGKANDANG,

DONNY SANDITO W., S.STP, M.SI

Pembina

NIP. 19770724 199602 1 001

## Hasil penilaian IPMas dan IKLI yang dilakukan oleh Bappeda

No.	Indikator Makro Kinerja Pembangunan Daerah	2019		2020		2021		2022		2023	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target Perubahan	Capaian	Target Perubahan	Capaian	Target Perubahan	Capaian
1	Indeks Modal Sosial (IMS)	81,36	80,88	83,52	81,2	85,68	82,65	87,84	83,57	90	83,65
	Kecamatan Blimbing		80,886		81,78		83,43		80,95		84,02
	Kecamatan Lowokwaru		83,407		81,29		83,92		85,34		82,5
	Kecamatan Klojen		79,109		79,91		80,42		86,45		82,08
	Kecamatan Sukun		80,683		83,08		78,95		83,81		87,28
	Kecamatan Kedungkandang		79,447		81,23		85,41		82,85		82,37
	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	83,6	84,6	85,2	82,95	86,8	84,15	88,4	84,83	90	84,88
2	Kecamatan Blimbing		84,175		82,09		85,25		80,33		86,08
	Kecamatan Lowokwaru		87,017		82,45		85,3		84,88		85,55
	Kecamatan Klojen		84,804		83,01		80,98		88,66		83,5
	Kecamatan Sukun		83,695		84,67		81,72		88,13		84,78
	Kecamatan Kedungkandang		83,47		83,12		74,47		83,93		84,49
	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	3,9	4,14	4,05	4,06	4,2	4,23	4,35	4,36	4,5	4,51
3	Kecamatan Blimbing		4,032		4,032		4,17		4,36		4,53
	Kecamatan Lowokwaru		4,234		4,234		4,39		4,4		4,51
	Kecamatan Klojen		3,782		3,782		4,4		4,51		4,59
	Kecamatan Sukun		4,734		4,734		4,16		4,3		4,44
	Kecamatan Kedungkandang		3,908		3,908		4,02		4,28		4,46



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**INSPEKTORAT DAERAH**  
 Jl. Gajahmada No. 2A Telp / Fax. (0341) 364450 Kode Pos. 65119  
**MALANG**

**BERITA ACARA**  
**HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN ANGGARAN 2023**

Pada hari Senin tanggal 19 Juni Dua Ribu Dua Puluh Tiga telah dilakukan klarifikasi terhadap hasil Evaluasi SAKIP Tahun Anggaran 2023 pada Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Adapun hasil Evaluasi SAKIP diperoleh Total Nilai sebesar 86,60 (Nilai A) dengan rincian nilai tiap komponen sebagai berikut :

1. Komponen Perencanaan Kinerja dengan nilai 27,6 dari bobot 30
2. Komponen Pengukuran Kinerja dengan nilai 27,00 dari bobot 30
3. Komponen Pelaporan Kinerja dengan nilai 12,75 dari bobot 15
4. Komponen Akuntabilitas Kinerja Internal dengan nilai 19,25 dari bobot 25

Berdasarkan hasil Evaluasi SAKIP tersebut di atas maka ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam dokumen SAKIP maupun implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Dilakukan pengarsipan dokumen Akuntabilitas Kinerja Internal Kecamatan Kedungkandang secara berkala minimal selama 5 tahun berturut-turut;
2. Melakukan publikasi dokumen perencanaan kinerja dan dokumen laporan kinerja di website Kecamatan Kedungkandang secara berkala dan tepat waktu;
3. Menciptakan inovasi yang dapat diterapkan dalam pelayanan sehari-hari dalam kaitannya untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Kedungkandang;
4. Meningkatkan capaian kinerja di tahun berjalan dan tahun berikutnya;
5. Menindaklanjuti Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada tahun berjalan maupun pada tahun berikutnya.

Evaluator :

1. Revina Anisandra, SE : 
2. Sasanti Rahmawardhani, SE, M.Si : 

Perangkat Daerah :

1.  : 
2. Ertin Malsar : 